PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN DUKUN

CASCADING

KECAMATAN DUKUN

TAHUN 2026

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Indeks Pelayanan Publik
SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di kecamatan
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)	IKM Kecamatan
PROGRAM (SIPD)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	1.1. terwujudnya kelancaran, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan operasional serta administrasi internal perangkat daerah. 2.1. Meningkatnya Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik. 3.1 Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan 4.1 Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Cerme 5.1. meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Persentase layanan yang dselesaikan tepat waktu Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase gangguan trantibum di kecamatan yang di tangani Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
KEGIATAN (SIPD)	1.1. PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.3.ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.4 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.5 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.1 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TEDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 3.1. KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 3.2. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 4.1 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.2. KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI WILAYAH KERJA DAERAH 5.1. FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	1.1.1. Tersusunnya Dokumen penganggaran dan Pelaporan Kinerja 2.2.1. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.1.1. Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran, ketertiban administrasi persuratan dan kearsipan, pemudahan logistik kantor, serta efektivitas pelayanan 3.2.1. Meningkatnya kapasitas, kemandirian, dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan kowilayahan serta partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan. 4.1.2. Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan perda perkada 5.1.1.Meningkatnya fasilitasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Jumlah Dokumen Penggeseganan dan Laporan Kinerja yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase Pemenuhan operasional perkantoran, ketertiban administrasi persuratan dan kearsipan, pemudahan logistik kantor, serta efektivitas pelayanan Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Perkantoran Jumlah Barang Milik Daerah yang di Fasilitasi Pemeliharaannya Jumlah kegiatan yang difasilitasi Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan yang Aktif dan Tertibna Persentase laporan gangguan trantibumlinmas yang ditindaklanjuti Persentase laporan penerapan dan penegakan perda perkada Persentase desa/kelurahan yang di fasilitasi administrasi pemerintahan
SUB KEGIATAN (SIPD)	1.1.1.1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.1.1.2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.1.1.3. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.2.1.1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.2.1.2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.2.1.3. PENYEDIAAN KOMPONEN BERTALIAN LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.2.1.4. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.3.1.4. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.3.1.5. PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.3.1.6. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.3.1.7. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.3.1.8. DUKUNGAN PELAKSANAAN SPBE PADA SKPD 1.3.1.9. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.3.1.10. PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.3.1.11. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.3.1.7. DUKUNGAN PELAKSANAAN SPBE PADA SKPD 1.4.1.1. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.4.1.2. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.5.1.1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,BAYAR PAJAK,BIAYA PERIZINAN DAN PAJAK KENDARAAN PERDIMBANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS LAINNYA 1.5.1.2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,BAYAR PAJAK,BIAYA PERIZINAN DAN PAJAK PERUNAN KENDARAAN PERDIMBANGAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.5.1.3 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.5.1.4. PEMELIHARAAN/REHABILIT ASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.1.1.1. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 1.1.1.1. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSREMBANG DESA 1.1.1.2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 1.1.1.3. PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1.1.1.4. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 4.1.1.1. SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA), SKPD INTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 4.1.2. KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL LAINNYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN RI 5.1.1.1. FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 5.1.1.2. FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.1.1.3. FASILITASI PENGELOLAAN PELUNGGAN DESA DAN PENDAPATA GUNAAN ASET DESA 5.1.1.4. FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 5.1.1.5. FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 5.1.1.6. KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA
SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD)	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat daerah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terwujudnya Komponen Listrik / Penerangan Kantor Terwujudnya paket perlatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya paket Bahan Logistik kantor Terwujudnya bahan cetakan dan penggandaan Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terselenggarannya dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD Terwujudnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terwujudnya jasa pelayanan umum kantor Terwujudnya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Terwujudnya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terwujudnya jasa pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya Terwujudnya Laporan Pemfasilitasan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam forum Musrembang desa Terwujudnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat Terselenggaranya fasilitasi koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dibidang penegakan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Terselenggaranya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan kekayaan desa asset desa Terselenggaranya fasilitasi dalam rangka penyusunan pembangunan partisipatif Terselenggaranya Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terselenggaranya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Logistik kantor Jumlah paket cetakan dan penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket SPBE Jumlah Paket Logistik kantor Jumlah paket cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket SPBE Jumlah paket jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor Jumlah unit jasa pemeliharaan dan pemeliharaan pajak kendaraan dinas Jumlah unit pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah dokumen laporan kegiatan pemrigkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrembang desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah laporan kegiatan sinergitas dengan kepolisian,TNI dan instansi vertikal lainnya Jumlah laporan koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah dibidang penegakan peraturan perundang-undangan Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah laporan kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pengelolaan kekayaan desa dan asset desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya